

# REORGANISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI INDONESIA

**M. Faishal Aminuddin**

Universitas Brawijaya Malang

*Email: faishal@gmail.com*

## ABSTRACT

*Indonesian politics after New Order drawing the raise of political islam movement. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Welfare Justice Party bring a newest ideological looked that rooted from Islamic value. This article tend to explore reorganizing of PKS in important periods. It capture changing the name from PK to became PKS which contained switching a fundamental movement typology from dakwah which emphasizing social and mass mobilisation to political reorganisation. This article's method is literature review. This period being critical phase that PKS has successful to maintain their ideology and compromise with political pathways. Indeed, PKS has one of the most influent party in the future indonesian politics.*

*Keywords: Political party reorganization, PKS, Post new order*

## ABSTRAK

*Dinamika politik di Indonesia pasca Orde Baru meumbuhkan gerakan Islam politik. Partai Keadilan Sejahtera membawa ideologi baru yang berakar pada nilai-nilai Islam. Artikel ini mencoba untuk mengeksplorasi reorganisasi PKS pada periode - periode penting perjalanan partai ini. Salah satunya adalah perubahan nama dari PK menjadi PKS yang membawa perubahan tipologi fundamental dari partai dakwah menjadi partai yang berbasis mobilisasi massa untuk reorganisasi partai. Analisa dalam artikel ini menggunakan tinjauan pustaka. Pada periode perubahan tersebut, PKS sukses dalam mengatur ideologi dan jaringan dengan unsur-unsur politik lainnya. PKS menjadi salah satu partai di Indonesia yang berpengaruh di masa yang akan datang*

*Kata-kata kunci: Reorganisasi Partai Politik, PKS, Pasca Orde Baru*

## PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru membuka kesempatan bagi semua kekuatan politik untuk tampil kepermukaan. Sistem multipartai yang dioperasikan dengan terbuka dalam suasana demokratis memberikan fasilitas bagi semua kekuatan politik

untuk membentuk parpol baru dengan tujuan yang baru atau yang bersifat revivalis dengan memanfaatkan semangat dan simbol parpol di masa lalu. Beberapa parpol yang sebelumnya tidak diunggulkan menuai sukses. Dalam pemilu 2004 PKS meraih 7,3% suara dan pada pemilu 2009 sebesar 7,9% dan tergolong lebih eksis ditengah terpuruknya parpol berbasis umat Islam.

Partai Keadilan (PK), menurut Liddle mewakili kelompok Islam baru yang tidak berakar pada kekuatan organisasi modernis yang pernah ada di Indonesia. Pemilihnya berasal dari latarbelakang perkotaan dan terkonsentrasi pada universitas terkemuka dimana kebanyakan pemimpinnya juga pengajar dan peneliti. Dalam pemilu 1999, PK tidak mengkampanyekan pendirian negara Islam tetapi membawa agenda pembarantasan korupsi, mengembalikan profesionalitas pemerintah dan pembuatan kebijakan ekonomi yang egaliter dimana pembangunan industri seimbang dengan pertumbuhan pertanian (William Lidle, 2003) Kampanye politik yang mengusung tema antikorupsi tetap dilanjutkan ketika PK berganti menjadi PKS. Dari sisi kampanye politik mempunyai perbedaan dengan dinamika pandangan politik internal.

Dalam studi Ruland (2005) PK bersama Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan parpol yang berbeda dengan parpol berbasis Islam lainnya karena menolak pemisahan negara dan agama. Anggota militan dalam PK dan PBB menuntut diberlakukannya *sharia* atau hukum Islam. Namun dalam fenomena yang paling mengejutkan yakni kemenangan mutlak PKS pada pemilihan legislatif di DKI Jakarta yang semula merupakan basis PDI-P dan Golkar. Pada saat itu, justru simbolisasi sebagai partai yang bersih dan bisa dipercaya yang dibawa PKS mampu memobilisasi massa dengan cepat di DKI Jakarta untuk isu-isu nasional disaat yang sama, kaderisasi PKS dimulai di kampus-kampus penting di Indonesia.

Tulisan ini akan mengelaborasi mengenai faktor dominan yang membuat PKS maju sebagai parpol yang harus diperhitungkan kekuatannya dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana PKS melakukan reorganisasi internalnya?

PKS mempunyai karakteristik sebagai parpol massa yang begitu agresif. Secara ideologis, PKS diuntungkan oleh pilihannya menjadikan Islam sebagai asas dan meskipun eksklusif, dia bisa memainkan pencitraan sebagai parpol bersih. Fenomena politik islam

yang diwakili oleh PKS yang percaya pada jalur demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan atau minimal berpartisipasi didalamnya menarik untuk dikaji lebih jauh. Terkait dengan cara membangun basis konstituen dan menempatkan diri sebagai partai massa, PKS membutuhkan strategi baru yang memungkinkannya memunculkan organ-organ strategis disamping mendapatkan konstituen dari basis organisasi Islam yang sudah mapan. PKS memilih konsisten pada bentuk negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Meskipun terdapat kemiripan karena memang terinspirasi oleh model partai serupa di Turki, Aljazair dan Mesir, PKS mempunyai ciri khas tersendiri karena mampu merangkul segenap kekuatan politik Islam baik yang sudah mempunyai akar atau yang sama sekali baru. Bahkan penegasan basis ideologis dan jaringan sosial PKS sudah tampak kepermukaan bisa berlaku efektif dan berpotensi besar menjadi parpol Islam yang dominan dalam konstelasi politik nasional.

## KERANGKA TEORITIK

Partai massa dalam usahanya meraih suara akan melakukan diseminasi ideologi parpol dan mendirikan basis aktif keanggotaan, parpol kemudian memasuki banyak ruang dalam kehidupan sosial (Gunther & Diamond, 2003). Dalam pembagian lebih jauh, Partai massa memanfaatkan beberapa basis seperti sosialisme, nasionalisme dan agama. Partai massa berbasis agama dibagi lagi menjadi dua jenis yang berbeda yaitu antara *proto-hegemonic* dengan *fundamentalis*. Karakteristik terakhir melakukan reorganisasi negara dan masyarakat dengan pembacaan yang terbatas pada prinsip doktrin agama. Tipologi lainnya adalah *denominational* yang lebih bersifat pluralis pada agenda-agenda politiknya.

**Tabel Tipologi Partai Massa**

No	Tipologi
1	Sosialisme
2	Nasionalisme
3	Agama

Sumber: Gunther & Diamond

Hubungan jenis parpol dengan strategi penguasaan yang dilakukan tidak bisa mengabaikan birokrasi karena fungsinya sebagai kepanjangan tangan untuk

mengelola negara dan masyarakat. Dalam term organisasional, Partai menunjukkan bentuknya yang ekstrem dalam hirarki politik dan birokrasi dan keduanya bisa eksis sebagai pelindung bagi kandidatnya atau malah menjatuhkan Partai diantara kedua bentuk ekstrem tersebut (Morgenstern 2001: 235). Dari penjelasan ini, secara organisasional, parpol bisa memilih diantara sekian banyak cara sehingga bisa menjawab sesungguhnya tidak satu bentuk organisasional yang paling benar dari parpol, baik yang diidealkan untuk saat ini dan masa depan. Parpol juga tidak lebih baik dalam kapasitas organisasionalnya daripada organisasi masyarakat lainnya. Keduanya sama-sama ingin menunjukkan struktur formal yang melekat pada dirinya sementara sistem hubungan informal, prosedur pelaksanaan dan nilai yang dibawa cenderung dikamufleskan. Tidak semua parpol bisa diidentifikasi dengan jelas tanpa penelurusan yang mendalam apa sebenarnya yang diinginkannya.

Dalam menilai dukungan bagi parpol perlu diketahui juga jaringan sosialnya. Perhatian ini harus diberikan menyangkut komposisi dan karakteristik kelompok pendukung seperti basis ideologi dan sosialnya, durabilitas dan heterogenitasnya (Kollner & Basseau, 2005). Dukungan bagi parpol tidak sepenuhnya menjadi jaminan terselenggaranya visi dan misi organisasional karena bagaimanapun juga parpol harus melampaui kompetisi pemilu terlebih dahulu. Kitschelt (2001) menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan usaha parpol sejalan dengan konfigurasi sistem kepartaian dan *framing* umum kebijakannya. Hubungan erat antara sistem kepartaian dengan pencapaian parpol perlu diposisikan dalam kerangka hubungan sebab akibat secara vertikal sementara itu terdapat hubungan linier-horisontal untuk melihat bentuk dukungan dan jaringan sosial parpol dengan pencapaian parpol sendiri.

Hubungan parpol dengan sistem pemilu dalam taraf tertentu bisa saling memberi keuntungan. Partai bisa besar apabila mampu merangkul banyak dukungan dengan pembilahan yang lebih heterogen dari latarbelakang konstituen. Dalam memberikan rasa keadilan, pemerintahan yang demokratis harus bersandar dan mempunyai gambaran mendasar tentang sistem pemilu yang cocok (Rose :1984). Masa depan demokrasi didirikan diatas sistem pemilu yang bisa menyebarluaskan

proses dan mekanisme yang jelas karena menjadi bagian dari institusi politik yang merefleksikan pergulatan banyak kecenderungan sosial, ekonomi dan politik (Le Duc et al 1996:4).

Dalam pemilihan sistem pemilu, Duverger (1984: 35) memberikan klaim bahwa sistem Proportional Representative (PR) secara umum melemahkan demokrasi sedangkan sistem Plural Majority (PM) justru akan memperkuatnya. Meskipun dalam studi Pippa Norris (1997: 311) telah dibantah, dia telah menguji keuntungan dan kerugian dari sistem pemilu yang berbeda-beda, dia menyimpulkan tidak ada sistem yang paling baik yang bisa diterapkan secara umum pada setiap negara. Pada awalnya PK merupakan Partai kader tetapi karena tidak meraih banyak suara dalam pemilu 1999, kemudian berubah menjadi PKS yang menawarkan diri dalam format parpol semi-terbuka dengan cara-cara agresif untuk merawat kader semasa PKS dan merebut konstituen dari ormas dan parpol Islam lainnya. PKS pada akhirnya menjadi partai dakwah dengan tipologi Partai kader berorientasi massa. Sistem pemilu PR di Indonesia memberikan dampak bagi eksistensi PKS. Paling tidak dalam menjaga stabilitas perolehan suara.

## HASIL DAN ANALISIS

### 1. PKS dan Gerakan Politik Islam

PK berdiri pada bulan Juli 1998, sebagai Partai *dakwah* yang dimaksudkan untuk menyebarkan dan mengkaji Islam. Pada pemilu 1999 PK memperoleh 1,34 persen suara nasional dan dipimpin oleh Nurmahmudi Ismail, seorang Insinyur lulusan IPB dan mendapatkan doktor dari Texas untuk spesialisasi teknologi pangan (Aris Ananta 2005). Gerakan PK dikampus telah diaktifkan setelah runtuhnya Soeharto dan mendapatkan banyak pengikut mahasiswa. Agenda menjadikan PK sebagai Partai dakwah mempunyai konsekuensi pada upaya pemberdayaan massa dan merekrut sedikit diantaranya untuk menjadi kader militan. Pembentukan militansi kader melalui sistem dakwah keislaman bukanlah hal baru dalam politik Indonesia karena Partai NU telah melakukannya pada era

tahun 1950 an. Sejak Orde Baru tidak ada Partai dakwah karena parpol Islam Masyumi yang dilarang. Praktis pergerakan dakwah hanya berada di lingkaran masjid yang berafiliasi pada kelompok dakwah seperti Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) yang menjadi penerus gerakan Masyumi.

Menilik status PK sebagai gerakan yang berbasis mahasiswa untuk pengajaran Islam, maka suara PK pada pemilu 1999 lebih disebabkan faktor eksklusivitas karena tidak mengandalkan basis massa dari arena yang lain. PKS lebih jelas sebagai parpol Islam yang bercorak semi-sektarian dan terorganisir rapi yang naik dari status pinggiran (Demos 2005). PKS mampu mendulang 7,34 persen suara dari 8,3 juta pemilih dan menempatkan 45 wakil di DPR. Setelah Nurmahmudi, sejak tahun 2000, PKS dipimpin oleh Hidayat Nurwahid, alumnus ponpes Gontor, Jawa Timur dan mendapatkan doktor dalam studi hukum dan teologi Islam di Universitas Madinah. Pergeseran orientasi dari basis massa mahasiswa yang cenderung eksklusif dan memperluasnya untuk merebut massa mengambang dari NU dan Muhammadiyah membuka peluang bagi PKS untuk menyedot suara yang begitu signifikan pada pemilu 2004. Banyak diantaranya suara dari PAN, PKB dan PPP.

PKS setelah diketuai oleh Hidayat Nurwahid lebih bercorak Islam modernis daripada basis mahasiswa teknokratis yang digalang semasa Nurmahmudi. Sentuhan politik yang begitu kelihatan, mengingat latarbelakang Hidayat yang dekat dengan kalangan Islam modernis tetapi sekaligus mengembang misi fundamentalisme. Jika pencitraan PK hanya sebatas sebagai gerakan dakwah dengan sasaran kampus universitas negeri di jurusan eksakta yang mempunyai karakteristik apolitis dan berbasis kelompok ekonomi menengah perkotaan. PK memegang peran kunci bagi pergerakan mahasiswa ekstrakurikuler dengan kedekatan emosional dan jaringan dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang kini sudah merambah dan besar dikampus negeri. Sesungguhnya peranan KAMMI sangat mendominasi sebagai pendukung dari isu-isu yang didistribusikan oleh PKS. Kemampuan mengorganisir massa yang begitu besar membuat KAMMI menjadi satu-satunya gerakan mahasiswa yang solid, teratur dan militan. PKS juga menyediakan dirinya sebagai ajang dan lompatan bagi kader terbaik mahasiswa untuk mengisi struktur kepengurusan Partai yang diambil dari kelompok persaudaraan (usrah) di kampus-kampus.

Perumusan garis ideologi PKS bisa dilihat dari dua sisi yaitu perpaduan antara islam modernis dengan fundamentalisme. Bisaj juga dinyatakan ideologi PKS adalah fundamentalisme garis lunak yang berpolitik. Tujuan PKS dan yang diterjemahkan sebagai landasannya adalah penegakan *sharia* melalui kompetisi pemilu dalam negara demokrasi sekuler seperti Indonesia. Garis ideologi PKS merupakan minoritas bersama PBB yang relatif sudah kehilangan basis massa. Cara PKS mengorganisir massa tidak bisa dilepaskan dari politik pencitraan sebagai parpol Islam masa depan yang berwajah manis. Sentimen fundamentalisme, meskipun tertutup oleh batas kepiawaian memainkan politik dalam sistem demokrasi sekuler masih seringkali muncul kepermukaan. Dalam teorisasi Azzam Tamimi (2005), ketika minoritas berada di wilayah negara yang menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi serta mempertahankan keyakinannya, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti aturan main yang sudah dibuat. Tugas mereka selanjutnya adalah mengorganisir keyakinannya di dalam masyarakat atau komunitasnya untuk disuarakan dalam mekanisme dan saluran politik yang ada.

PKS juga berjaringan dengan Partai lain yang berahalan sama diluar negeri. Garis ideologi PKS bukanlah asli dari penggalian dimensi fundamentalisme politik islam yang menyejarah di Indonesia melainkan dari adaptasi yang diambil dari Timur Tengah. Ada dua latar belakang yang dominan dari jaringan internasional yang dikembangkan oleh garis ideologi fundamentalisme politik Islam.

*Pertama*, transmisi gagasan secara langsung dari Timur Tengah ke Indonesia karena Asia Tenggara menjadi wilayah intelektual pinggiran dalam dunia Islam. Transmisi ini diikuti dengan mengalirnya wacana dominan yang menguasai struktur politik informal PKS, disamping itu dukungan dan aliran dana yang membantu sayap politik PKS dalam bentuk kerjasama mutualisme juga dilakukan.

*Kedua*, transmisi Islam ke Indonesia mempunyai faktor penarik dan pendorong dengan banyaknya pelajar yang menuntut ilmu di Timur Tengah dan beberapa pemerintahan dan lembaga donor disana memberikan dukungan bagi segala macam usaha pengembangan Islam yang sesuai dengan kondisi di timur tengah (Buballo& Fealy 2005). Tidak semua sarjana yang belajar di Timur Tengah masuk kedalam PKS

karena banyak diantaranya berada di NU tetapi kader yang dimaksud disini adalah kader yang semasa belajar bersingungan dengan aktivisme politik yang menggusung fundamentalisme politik Islam.

Di Indonesia, dalam sejarah politik Islam menyisakan gambaran buruk yaitu pertama, Partai Islam tidak pernah mendapatkan dukungan separuh dari pemilih muslim. Kedua, realisasi kebijakan Islam seperti pemberlakuannya sebagai konstitusi masih gagal dan ketiga selama pasca kemerdekaan, politik Islam selalu ditekan oleh penguasa. PKS mengangkat *sharia* sebagai modalitas yang dijual pada konstituennya, yang berarti PKS harus memformulasikan *sharia* untuk kelihatan berbeda, minimal dalam segi kemasannya agar tidak mengulang kesalahan dan kegagalan di masa lalu. PKS bisa sangat diuntungkan karena sistem demokrasi menjamin tiadanya tekanan penguasa atas politik Islam sekalipun sudah terang-terangan menjadikan Islam sebagai asas Partai dan tujuannya menegakkan *sharia* dalam NKRI.

Gerakan tarbiyah banyak disebut-sebut sebagai inspirator PKS karena beberapa diantaranya menjadi pendiri PK pada tahun 1998 sebagai reaksi dari tekanan politik yang diberikan oleh Orba pada gerakan Islam. Dalam pemilu 1999 PK mempunyai anggota 60,000 orang dan ketika sudah berubah menjadi PKS pada pertengahan 2003 anggota Partainya mencapai 300,000. Pada pemilu 2004 memperluas keanggotaan tidak terbatas pada gerakan tarbiyah dengan menempatkan 30 orang non muslim sebagai kandidat dalam pemilu. Pembukaan diri PKS pada dasarnya bukan hanya untuk menarik dukungan yang menunjukkan bentuk Partai terbuka karena permainan sistemik mereka tetap dipegang oleh kader-kader yang dipersiapkan khusus.

Dalam Pemilu 1999 yang menggunakan sistem PR "closed list" dimana pemilih menentukan pilihannya pada simbol parpol dan kemudian parpol akan menentukan siapa kader yang bisa duduk sebagai anggota parlemen, PKS mengambil keuntungan karena bisa menempatkan kader terbaiknya untuk duduk di DPR dengan suara yang didapat dari daerah pemilihan di perkotaan. Dalam pemilu ini, parpol merefleksikan berlakunya politik aliran, didalam parpol bisa diklasifikasi sekularis dan nasionalis (abangan), Islam modernis dan tradisional (santri). Islam sebagai jalan dan pandangan hidup berbeda dengan sekularisme yang memisahkan antara negara dan agama. Sekularisme menarik posisi agama

dari persoalan masyarakat dan negara, membatasinya hanya pada ruang personal dan tempat ibadah. Sebaliknya dalam politik Islam, agama harus menjadi petunjuk dalam semua aspek kehidupan dan hal ini menyebabkan benturan dalam demokrasi karena aspek moral masyarakat dipisahkan dari kehendak negara (Hassan 2005)

Beberapa sarjana yang menyebutkan PKS yang lebih condong sebagai Islam modernis beralasan karena basis pendukungnya adalah profesional dan pedagang kelas menengah, bersama PBB menginginkan pemberlakuan *sharia* (Sherlock 2004). Kategorisasi ini tidak bisa memperjelas arah ideologis karena perilaku politik PKS disatu sisi dipengaruhi oleh pemilahan basis ekonomi dan sosial tetapi disisi lain lebih banyak dipengaruhi oleh latarbelakang ideologis. Secara kasat mata dukungan PKS berada di kota-kota besar karena di tempat itu dia bisa mengorganisir massa dalam jumlah besar dan solid. Jika identifikasinya diletakkan pada perebutan identitas, maka PKS merupakan tempat pelarian bagi massa dari ormas atau parpol lain yang kecewa. Perebutan identitas merupakan hal yang menarik karena meskipun seorang pemilih mengaku berafiliasi pada NU atau Muhammadiyah tetapi akibat terjadinya kohesi sosial pada akhirnya menuntut mereka bisa memilih PKS. Terjadinya banyak tipikal identitas sebagai NU dan Partai Demokrat atau Muhammadiyah dan PKS memang baik bagi integrasi dan kohesi sosial (Schiller 2004).

Dalam kampanye pemilu 2004, PKS menjadikan *sharia* sebagai latarbelakang dan poin penting yang dijual pada publik. Platform perang terhadap korupsi, promosi keadilan dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dibawa menjadi agenda yang bisa diuji konsistensinya. PKS menjadikan agenda politiknya bisa dinegosiasikan dengan kekuatan lain selain kelompok nasionalis. Artinya, PKS tetap meletakkan strategi politik terbuka untuk menaikkan penawaran politiknya pada posisi jabatan publik bagi kader-kadernya. Agenda politik diatas dalam kacamata publik tentu membuat banyak orang menyukainya karena membawa unsur integritas dan komitmen yang tinggi. Ricklefs (2004) menafsirkan bahwa kemenangan PKS di Jakarta adalah harapan dari pemilih untuk mengakhiri korupsi

dan menetapkan kompetensi dan moralitas yang tinggi dalam pemerintahan. Pada kampanye pemilu 2009, PKS tidak banyak menampilkan sikap politiknya dalam isu-isu penegakan sharia dan memposisikan dirinya terlibat lebih jauh dalam perdebatan yang lebih ideologis. PKS lebih memilih pendekatan pragmatis dengan harapan bisa memperluas dukungan dan basis konstituen. Kampanye media yang paling fenomenal adalah pengakuan terhadap mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Bersamaan dengan itu, latarbelakang warna bendera PKS bukan lagi putih melainkan lebih berwarna-warni. Dari sini terlihat, secara organisasional, PKS adalah partai kader yang bergerak menjadi *catch all*.

## **2. Jaringan Dan Variasi Strategi**

Jaringan sosial yang dikembangkan PKS dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu pertama, model politisasi publik dengan pemanfaatan saluran politik formal yang didukung oleh sistem kaderisasi yang ketat dan solid. Model ini menguntungkan PKS karena mampu menyebarkan pencitraan dengan lebih baik mengenai kebenaran kampanye yang menanggapi berbagai macam isu baik domestik atau internasional. Kedua, model penanaman kader yang bertanggungjawab untuk mengendalikan organ penyangga di kalangan mahasiswa, pedagang dan akademisi. Setidaknya disektor tersebut PKS mendapatkan kekuatan yang sangat signifikan. Ketiga, model rekrutmen politik berlapis yang memungkinkan PKS bisa menyaring kader yang akan menduduki jabatan publik dan mempunyai militansi dalam mengembangkan garis ideologi. Menilik dari visi umumnya sebagai Partai dakwah dan visi khusus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani, PKS sebenarnya mengembangkan konsepsi politik-Islam. Islam menjadi alat perjuangan sekaligus solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip kebijakannya mengatur kebijakan dasar yang pluralisme karena tujuannya adalah persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras dan etnisitas.

Hubungan antara garis ideologi dan model jaringan sosial dituangkan dalam pembatasan konstitutif yang mempunyai sanksi ketat. Pembatasan yang dijabarkan dalam kebijakan dasar terdiri atas 10 landasan. Diantaranya berhubungan dengan dengan garis ideologi adalah *al ishlah* (reformatif) Dalam mengupayakan kemenangan sharia dan menegakkan daulah, *al syari'ah* (konstitusional) guna menetapkan hubungan pokok hubungan manusia-Tuhan dan manusia-manusia sesuai dengan al quran dan sunnah, *al wasathiyah* (moderat) yang menolak ekstrimitas dan eksageritas kezaliman dan kebatilan. *Al istiqamah* (konsisten) berpegang teguh pada aturan Islam dalam setiap hasil program dan kebijakan. Sementara jaringan sosial ditegaskan dalam *Al numuw wa al tathawwur* (tumbuh dan berkembang) tidak melahirkan stagnasi dan kehilangan kreativitas. *Al tadarruj wa al tawazun* (seimbang dan proporsional) gerakan Partai harus dilakukan secara bertahap dan proporsional yang melaikat dalam kiprah individu dan kolektif. *Al awlawiyat wa al mashlahah* (prioritas dan kemanfaatan) lebih merefleksikan kebutuhan strategi dan taktik perjuangan yang melekatkan kepentingan ummat diatas kepentingan individu dan kelompok.

Perhitungan politik PKS lebih banyak didasarkan pada pendekatan negosiasi. Tampaknya juga sangat berhati-hati dalam menentukan posisi politiknya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Di ranah parlemen, PKS menempuh strategi politik kooperatif daripada berdiri di barisan oposisi. Tetapi organ PKS diluar ring parlemen juga mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fungsi pembentuk opini alternatif. Penolakan usulan Jusuf Kalla tentang penggabungan waktu pemilu dan pilkada ditolak oleh PKS melalui ketua badan pemenangan pemilu PKS, Muhammad Razikun dengan alasan tidak menyehatkan. Ketakutan yang paling mendasar adalah jika beban memilih diberikan pada pemilih yang belum menyadari arti penting memilih sementara waktu antara pemilu dan pilkada digelar bersamaan, maka pilihannya akan diberikan dengan asal-asalan. Pernyataan tersebut terlalu umum untuk dijadikan perangkat kontrol terhadap wacana kekuatan politik lain yang terkait dengan kekuasaan seperti hubungan antara Jusuf Kalla dan Golkar.

Pada tahun 2004, PKS tampak lebih pragmatis dengan menempatkan kader-kadernya untuk mendukung kandidat presiden yang berlainan. Setelah Amien Rais gagal melaju di putaran kedua, mereka beralih mendukung pasangan SBY-Kalla sehingga pilihan ini menempatkan sekurangnya empat kader di jabatan kementerian dalam kabinet SBY-Kalla (Ahmad Norma, 2008) Keputusan PKS tersebut diambil dari mekanisme persidangan Majelis Syura yang ketiga dengan mendukung pasangan SBY-JK dalam pemilu presiden. Perilaku strategis yang ingin ditunjukkan oleh PKS pada konstituennya adalah pemberian harapan bahwa SBY-JK merupakan figur yang bisa dipercaya meskipun dari perhitungan negosiasi, keputusan untuk mendukung SBY-JK lebih pada persoalan perebutan jatah di kabinet. Kepercayaan yang terlalu tinggi dari konstituen pada amanat partai membuat kecemasan diantara kader-kader kritis yang melihat ada persoalan hegemonisasi wacana dan monopoli strategi. Sangat terlihat jelas manakala kebijakan SBY tidak pro pada publik, elit politik di DPP PKS membela amanat partai dikarenakan kontrak politik antara PKS dan SBY-JK belum selesai.

Isyarat yang diberikan oleh PKS yang menginginkan berperan untuk menjalin kinerja sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah semakin menguatkan dugaan bahwa strategi negosiasi dari PKS memang bermaksud untuk mendekati pada pemerintah dengan harapan bisa menata kadernya di jabatan-jabatan penting. Strategi ini harus mengorbankan suara yang datang dari kadernya meskipun 62 persen kader di DKI Jakarta pesimis atas posisi PKS dengan pemerintah dan di Yogyakarta mencapai 75 persen yang menyatakan PKS akan rugi jika tetap mendukung SBY-JK.

Penjelasan strategi negosiasi yang dilakukan oleh PKS menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dan terdapat proses mengabaikan yang dilakukan elit pusatnya pada suara-suara daerah. Strategi memainkan opini publik yang bertujuan untuk meyakinkan kader-kadernya hanya sebatas pada kalimat bahwa PKS akan mengkritisi komposisi dan kinerja kabinet SBY-JK dengan harapan jangan sampai terjebak pada orang yang tidak mempunyai moral bersih, terlibat KKN dan sebagai kepanjangan tangan IMF. Strategi pewacanaan konsepsi ideal menjadi pilihan yang tidak terelakkan. Elit politik PKS menerapkan strategi ini dengan lebih hati-hati. Bahasanya diperhalus seperti komitmen pemerintah juga ditunggu dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi kerakyatan. Demikian juga pencitraan dari kasus penolakan ketua MPR dari PKS

Hidayat Nurwahid atas pemberian mobil dinas volvo selama masa jabatan pimpinan MPR dan juga menolak menggunakan fasilitas mewah. Akibatnya, dukungan PKS dalam deklarasi berisi lima butir kesepakatan yang diberi judul nota kesepahaman untuk sebuah kebersamaan dalam melaksanakan perubahan menuju Indonesia madani yang adil, aman dan sejahtera hanyalah salah satu pendukung strategi pewacanaan atas konsepsi ideal yang justru semakin memperkuat opini dan pencitraan PKS sebagai parpol bersih dan representatif bagi pemilih yang menginginkan perubahan.

PKS mengelola diri dengan strategi politisasi publik yang mengkampanyekan pencitraan sebagai partai yang berpihak pada kepentingan umat Islam dalam sistem demokrasi di Indonesia. Strategi lainnya adalah pewacanaan yang bergerak untuk memasukkan ajaran-ajaran teologis yang dibawa oleh PKS dengan perangkat politik Islam. Konstituen coba diyakinkan bahwa politik adalah baik dan sangat bermanfaat tanpa harus terjebak dalam kekotorannya. Pencitraan atas konsepsi ideal ini menjadikan PKS semakin diterima karena ditunjang oleh proses negosiasi dengan pemerintah untuk meletakkan kadernya pada jabatan publik dengan harapan bisa membuktikan kinerja PKS secara langsung pada publik.

Amanat politik yang disampaikan pada SBY mempunyai gambaran pada usaha untuk melakukan integrasi sosial dalam politik nasional. Diantaranya yang paling menarik adalah mempertahankan kedaulatan NKRI (butir 2) dan melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia dalam rangka terbentuknya masyarakat madani yang mengedepankan supremasi sipil dan tidak menghadirkan pemerintahan yang militeristik atau *police state* (butir 3). Butir pertama menegaskan suara yang menyatakan kecurigaannya bahwa PKS akan mengganti NKRI menjadi negara Islam. Asas politik Islam yang dibawa oleh PKS tidak serta merta menunjukkan fundamentalisme politik melainkan dari sisi keagamaannya. Sedangkan butir ke 3 juga menjadi penjamin utama dari cita-cita PKS menjadikan pemerintahan sipil sebagai pilihan terbaik daripada militeristik dan negara yang selalu memata-matai warganegaranya. PKS memakai nama masyarakat madani untuk menggambarkan kedekatannya dengan pemikiran Islam modernis daripada fundamentalis. Sebuah perpaduan yang tidak gampang dan unik.

Keinginan PKS untuk merebut suara dari NU dan Muhammadiyah serta ormas lain yang berhaluan fundamentalis memanfaatkan media pelayanan sosial. Kebutuhan masyarakat bawah untuk urusan dan persoalan keseharian dilihat sebagai peluang seperti yang dilakukan oleh DPC PKS Surabaya yang memanfaatkan lebaran sebagai cara untuk menjaring anggota dengan pelayanan kesehatan gratis, pemberian takjil, konsultasi spiritual dan pengobatan *ruqyah* dan bekam ([www.mediaindo.co.id](http://www.mediaindo.co.id)). Sepintas apa yang dilakukan juga hampir dilakukan oleh semua parpol untuk menarik simpatisan. Tetapi ada pencitraan ideologis yang dibangun oleh PKS dengan memanfaatkan kader-kadernya yang berprofesi sebagai dokter untuk terlibat sebagai ideolog dan para *ustadz* untuk menyebarkan landasan keimanan Islam dalam kerangka dakwah dan terpenting adalah simbolisasi pengobatan *ruqyah* yaitu mengeluarkan pengaruh jin dan sihir dari manusia. Praktek terakhir, bersama terapi bekam merupakan ciri khas yang diambil dari tradisi semasa rasul Muhammad. Ormas semacam Muhammadiyah malah menolak tradisi ini dan NU juga tidak terlalu mememanfaatkannya

Respon dalam politik internasional juga dikeluarkan yang mengarah pada keberpihakan pada dunia Islam. Pencitraan ideologis bahwa PKS sebagai bagian dari internasionalisme Islam lebih menguntungkan bagi PKS karena keberadaannya bisa dimonitor secara langsung oleh publik dunia. Keputusan DPD PKS yang menuntut pada AS menghentikan serangan ke Fallujah karena dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip perdamaian ([www.mediaindo.co.id](http://www.mediaindo.co.id)) Hal serupa juga dilakukan dengan anjuran untuk memboikot produk Thailand ([www.mediaindo.co.id](http://www.mediaindo.co.id)) karena perlakuan pemerintahannya pada komunitas muslim Pattani. Argumentasi dan opini yang dibangun oleh PKS dalam isu-isu internasional tidak hanya melibatkan rasionalisasi atas pertanyaan mengapa semua persoalan yang dianggap tidak adil bagi dunia Islam perlu disuarakan? Meskipun sebenarnya tidak menguntungkan PKS karena ketidasetujuannya dengan politik AS bisa dengan mudah menjerumuskannya dalam stigmatisasi Islam radikal. Mobilisasi massa serentak di seluruh tingkat kepengurusan untuk menanggapi isu internasional merupakan keberhasilan PKS karena protes tersebut diikuti oleh pengiriman delegasi dari fraksi PKS yang menghadap Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan lima butir pernyataan sikap.

Dibandingkan partai lain yang mendulang suara dari basis umat Islam, PKS merupakan partai yang menyadari perilaku pemilih dengan lebih responsif. Menjual

kampanye yang ideologis tidak banyak laku dihadapan pemilih karena yang diinginkan pemilih adalah kiprah partai dalam persoalan publik. Tema-tema kampanye politik yang menyentuh ruang kebutuhan publik secara langsung lebih menjanjikan keuntungan daripada memelihara konservatisme ideologi politik. Pilihan untuk melakukan reorganisasi dari partai kader ke partai catch all merupakan fenomena menarik, terutama bagi partai yang mengusung simbolisme keagamaan sebagai landasan ideologinya. PKS mampu bertahan dan secara meyakinkan mampu menjadikan pragmatisme politik sebagai keniscayaan bagi gerakan politik elektoral untuk memperoleh tempat sebagai bagian dari kekuasaan.

## **KESIMPULAN**

PKS merupakan partai berbasis agama yang berani melakukan modifikasi gerakan politiknya. Konsekuensinya sangat besar bagi perubahan pola reorganisasi, strategi dan jenis partainya. Semangat modifikatif tersebut menjadi salah satu pembuktian paling baik dalam melihat akselerasi perolehan suara partai-partai agama dalam ruang politik yang demokratis. Evolusi PKS bukannya muncul tanpa tantangan, karena perubahan orientasi dari gerakan dakwah yang mencoba peruntungan melalui partai agama yang kolot tidak mampu menanggung banyak perolehan suara. Dalam pemilu 1999, Partai Keadilan terpuruk sehingga harus berganti strategi ketika menjadi PKS dan ikut pemilu 2004.

Reorganisasi PKS dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penting yang datang dari konteks demokrasi Indonesia. Diantaranya adalah memperlunak garis ideologi dalam rangka kepentingan jangka pendek pendulungan suara. Caranya dengan memosisikan diri secara tegas pada isu-isu yang diminati atau dituntut oleh publik. Isu-isu anti korupsi dan konsistensi dalam mengawal pemerintahan yang baik mampu memberikan keuntungan yang lebih besar daripada memelihara basis ideologi lama dan hanya berharap dari pemilih ideologis saja. Sekalipun demikian, pola kaderisasi tetap dijalankan dengan ketat sehingga mekanisme seleksi kandidat kurang mengakomodasi figur-figur yang dalam pengertian ideologis, sangat lunak.

Pragmatisme sebagai haluan politik baru dari partai modern membuktikan hal yang penting untuk dicermati. PKS, bukan tidak mungkin akan mereorganisir dirinya sebagai

partai massa yang besar dan mempunyai pendukung ideologis dan kader-kader loyalis. Dengan demikian, metamorfosis PKS hanya akan menjadi strategi jangka menengah sambil menata basis konstituen yang pelan tapi pasti sudah mulai terbentuk dan melingkupi wilayah kesadaran sosial politik yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris et al. 2005. *Emerging democracy in Indonesia, Singapore*. Institute of Southeast Asian Studies
- Demos. 2005. "Demokrasi Oligarkis di Tengah Jalan". TEMPO Edisi 24 April.
- Duverger, Maurice. 1954. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. New York: John Wiley Inc.
- Haniff Hassan, Muhammad. 2005. *Islam, Pluralism & Multi-Culturalism*. IDSS Commentaries. September.
- Kitschelt HP. 2001. *Parties and Interest Intermediation, in Blackwell Companion to Political Sociology, edited by Kate Nash and Alan Scott*. Oxford. Blackwell.
- Liddle, William. 2003. "New Patterns of Islamic Politics in Democratic Indonesia. Piety and Pragmatism: Trends in Islamic Politics". *Asian Program Special Report 110*.
- Norris, Pippa. 1997. *Passages to Power Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge University Press
- Ruland, Jurgen dkk. 2005. *Parliaments and Political Change in Southeast Asia A Comparative Study of India, Indonesia, the Philippines, South Korea and Thailand*. ISEAS
- Richard Gunther and Larry Diamond. 2003. "Species of Political Parties: A New Typology". *Journal Party Politics, Vol. 9, No. 2*.
- Schiller, Jim. 2004. "What is an Election Supposed to Do? A local perspective on the 2004 Indonesian Elections". *the 19th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Canberra*
- Sherlock, Stephen. 2004. "The Role of Political Parties in a Second Wave of Reformation. Unpublished paper, UNSFIR Jakarta
- Tamimi, Azzam, Rashid Ghannouchi. 2001. *A Democrat Within Islamism*. Cary, NC. USA. Oxford University Press.